

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) menjadi konsensus politik nasional, dan merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia.

Indonesia pertama kali melaksanakan pemilukada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal¹.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diselenggarakanlah Pilkada secara langsung. Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung Pilkada di 207 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi. Tahun 2007 berlangsung Pilkada di 35 Kabupaten/Kota dan 6 Provinsi. Tahun 2008 dilaksanakan 160 Pilkada di 13 Provinsi, 147 Kabupaten/Kota².

Sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan sesuai kondisi berakhirnya masa jabatan kepala daerah disuatu daerah tersebut namun ada beberapa faktor yang menjadikan pilkada tahun 2020 dilaksanakan secara serentak Kondisi wilayah dapat mempengaruhi penyelenggaraan pilkada serentak, terutama adanya bencana non alam yang terjadi di suatu daerah Pilkada.

¹ Suharizal, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 3

² *Ibid*, Hlm. 7

Sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dimana kondisi negara sedang dalam situasi pandemi Covid-19. Pilkada serentak adalah suatu proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan pilkada serentak diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2020.³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tradisi pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara penunjukan/penugasan dan pemilihan melalui perwakilan menjadi tidak berlaku. Era baru dalam hal mekanisme pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan sejak tahun 2005.

“Fitriyah pernah menyatakan, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan koreksi dari pelaksanaan regulasi sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menggunakan sistem parlementer. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, namun dipilih oleh DPRD. Sistem Pilkada yang diwakilkan kepada politisi dalam DPRD praktiknya telah melahirkan pemerintah yang lemah. Sementara Anggota DPRD dipilih melalui Pemilu, yang berarti rakyat memilih langsung mereka. Karenanya DPRD yang dipilih oleh rakyat lebih legitimit dibanding kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketidak seimbangan kekuasaan ini melahirkan peluang terjadinya instabilitas politik di daerah. Diantaranya terjadi pelengseran sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa jabatan⁴.”

Pada awalnya, Pilkada langsung diharapkan menjadi tonggak demokratisasi masyarakat di tingkat akar rumput (grass root) melalui peningkatan kesadaran partisipasi politik untuk menentukan masa depan daerah ke arah stabilitas politik.

³ kompaspedia.kompas.id, “Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia”. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia> diakses Pada 14 Januari 2023 pukul 14.23 WIB

⁴ Ari Pradhanawati, 2015, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, KOMPIP, Surakarta, hlm. 24

Namun, hingga saat ini, harapan mewujudkan demokratisasi masyarakat melalui pilkada langsung ternyata sulit tercapai. Faktanya, Pilkada langsung, yang awalnya diharapkan dapat menghentikan intervensi pihak mana pun, masih didominasi oleh campur tangan elit partai politik. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah.

Elit partai politik di tingkat pusat memiliki kewenangan besar dalam penetapan tersebut. Hasilnya, kemudian cenderung bersifat oligarkis, dibanding demokratis. Campur tangan partai politik tersebut kerap menuai kritik publik karena melibatkan banyak isu negatif seperti proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, isu mahar politik dalam pencalonan, pengabaian suara publik terhadap politik kekerabatan di daerah, dan bagaimana partai politik bisa bekerja dalam mengawal pengusungan kandidat sebagai sebuah mesin politik yang efektif agar tidak sekadar menjadi pemberi tiket⁵.

“Pelopor utama dari organisasi ke masyarakat tersebut adalah Boedi Oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing”.⁶

Sejak berdirinya partai politik, pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Selama perkembangannya, partai politik dan sistem pemilu sudah terus mengalami perbaikan tahun demi tahun. Runtuhnya rezim Orde Baru yang

⁵ Hatta Abdi Muhammad, Dony Anggara, *Dinasti Politik pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020: Analisis Perilaku Pemilih*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2021, Vol. 11, No. Hlm.112

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 422.

digantikan dengan zaman reformasi merupakan langkah awal bagi warga negara Indonesia untuk terus aktif berpartisipasi dalam rangka proses demokratisasi ke arah yang lebih baik. Namun, pergeseran kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi tidak otomatis meningkatkan sistem politik di Indonesia ke arah yang lebih demokratis.

Sebagai dampak dari tumbuhnya “politik baru” pasca otonomi daerah dan perubahan lanskap politik di level lokal, maka menghasilkan elit-elit informal yang menjamur menjadi elit formal politik⁷. Otonomi daerah, redistricting, dan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah sebagai arena munculnya para elit lokal tersebut. Para elit informal tersebut berebut untuk menjadi elit politik formal karena memiliki posisi istimewa untuk terus dapat menguasai sumber-sumber kekuasaan politik dengan menggunakan dukungan-dukungan dari klien, kroni, maupun relasi-relasi bisnis mereka (bos-bos ekonomi).⁸ Efeknya sangat nyata dari hasil dinasti politik tersebut, sehingga menyulut ungovern ability yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien), perampasan keuangan daerah, dan relasi kekuasaan politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya⁹.

Dampak dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah yaitu menghasilkan elit-elit lokal yang berkuasa dengan cara menggunakan simbol-simbol kekuasaannya untuk memobilisasi dukungan rakyat. Politik lokal di Indonesia era

⁷ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik*, (AIPI), Edisi 21, 2010, Hlm. 9.

⁸ *Ibid*, Hlm. 17

⁹ *Ibid*, Hlm.21

desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah telah berubah menjadi ajang bagi para elit di tingkat lokal untuk menguasai seluruh aspek kehidupan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan elit lokal tersebut didukung oleh kekayaan dan kemampuan politiknya untuk melakukan pembelian suara, memanipulasi suara, melakukan tawaran politik (*bargaining position*), dan memobilisasi masyarakat berdasarkan etnis tertentu¹⁰. Istilah dinasti politik atau politik dinasti menurut pemahaman penulis dimengerti sebagai praktik membangun kekuasaan yang menggurita oleh sejumlah orang yang masih memiliki kaitan kekerabatan.

Tak seperti beberapa tokoh serta figur politik yang memiliki trah kekeluargaan dan kekuatan politik yang telah terbangun karena adanya pola kekeluargaan di dalamnya kasus kekalahan politik atau runtuhnya kekuasaan politik kekeluargaan terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat lalu, yang mana salah satu calon merupakan tokoh yang memiliki pola dinasti politik atau politik kekeluargaan yang telah terbangun sebelumnya. Apa lagi tokoh ini juga merupakan tokoh politik lama yang telah memiliki kekuatan politik dilihat dari beberapa kali memenangkan pemilu dan memiliki jabatan di legislatif.

Lembaga Kajian Politik, Demokrasi, dan Kenegaraan Nagara Institute merilis 5 provinsi dengan calon kepala daerah yang terhubung dinasti politik pada

¹⁰ Sumartono Karim, *Kelompok Elite Dalam Implementasi Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 2010, Hlm. 63.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020¹¹. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Nagara Institute, terdapat 5 provinsi dengan calon kepala daerah yang terhubung dengan dinasti politik terbanyak, yakni Sulawesi Selatan (13 calon), Sulawesi Utara (11 calon), Jawa Tengah (11 calon), Jawa Timur (8 calon), dan Banten (8 calon). Menurut hasil riset, di Sulawesi Selatan, mayoritas calon mengikuti pemilihan Walikota Makassar dengan jumlah sebanyak 5 orang. Adapun di 4 provinsi lainnya, calon-calon tersebar di setiap kabupaten/kota yang melakukan pemilihan¹².

Sebanyak 129 orang calon dari 739 pasangan calon tercatat oleh Nagara Institute memiliki hubungan dengan dinasti politik, dan 57 calon tersebut memenangkan kontestasi. Meski begitu, 27 calon digugat ke Mahkamah Konstitusi. Calon yang menang yakni 57 calon, 57 di antaranya kemudian diajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan 30 calon lainnya menang tanpa gugatan¹³.

Sebanyak 27 calon yang digugat, 22 orang di antaranya memenangkan gugatan, dan sisanya lainnya melakukan pemungutan suara ulang. Daerah yang melakukan pemungutan suara ulang adalah Kabupaten Nabire, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Jambi. Adapun gugatan-gugatan yang dilayangkan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, pengerahan Aparatur

¹¹ nagarainstitute.com, “Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”. <https://nagarainstitute.com/wp-content/uploads/2020/10/NASKAH-DINASTI-POLITIK- NAGARA-NAGARA-INSTITUTE>. Diakses pada 14 Januari 2023 pukul 17.04 WIB

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*,

Sipil Negara (ASN) oleh petahana untuk mensosialisasikan visi & misi pasangan calon, dan dugaan tidak netralnya penyelenggara. Selain itu, terdapat juga gugatan yang dikarenakan surat suara yang sudah robek, jumlah pemilih yang lebih banyak dari jumlah penduduk, dan kewarganegaraan calon.

Nagara Institute menyimpulkan, calon yang digugat maupun yang tidak digugat membuktikan bahwa politik dinasti tidak memberikan jaminan bahwa mereka akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu peneliti tertarik melihat kegagalan yang diperoleh oleh tokoh kharismatik yang notabne telah memiliki trah politik dinasti dan kekuatan politik melalui kelembagaan di kubu partai politik serta jabatan yang pernah diemban namun tidak cukup untuk memperlihatkan kekuatan dalam pemilihan kepala daerah di Tanjung Jabung Barat 2020 lalu.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi dikenal dengan wilayah basis banteng atau partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P). Ungkapan ini kemudian terbukti dengan beberapa kali pemilihan legislatif PDI-P selalu menjadi jawara baik sebagai pemenang dengan suara terbanyak 1 ataupun diposisi 2. Terlebih pada saat pemilihan kepala daerah beberapa kali periode selalu di taklukan oleh PDI-P. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang dikenal dengan wilayah basis partai berlambang Banteng moncong putih. Selain itu koalisi pengusung pasangan Mulyani-Amin ini juga diisi oleh partai yang memiliki kekuatan politik serta basis suara yang hampir sama dengan PDI-P.

Pada pilkada serentak tahun 2020 lalu Pilkada Tanjung Jabung Barat diikuti oleh beberapa kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Diantaranya, Pasangan calon nomor urut 1 calon Bupati Mulyani Siregar, SH dan calon Wakil Bupati Muhammad Amin Abdullah Skm., Mkes. Sosok Mulyani Siregar merupakan Ketua DPRD dua periode Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini sedang mencalonkan diri untuk melanjutkan trah kakaknya Syafrial yang juga merupakan mantan bupati Tanjabbar 2 periode¹⁴. Melalui partai besutannya bukanlah hal yang sulit. Ditambah lagi PDI-P selalu menjadi basis masa kemenangan di setiap pemilihan terbukti pada pileg 2019 lalu PDI-P merupakan pemenang. Sedangkan sosok wakilnya Amin atau Muhammad Amin Abdullah yang merupakan anak ketiga, dari KH. Abdullah Bin Syeik KH. Abdul Wahab Bin KH Ismail Nagara yang merupakan salah satu ulama di Tanjab Barat. Selain itu Amin berkarier sebagai aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi¹⁵.

Sosok M. Amin calon wakil bupati yang mendampingi Mulyani Siregar ini memulai pendidikan di SD MHI, SMP Negeri 1 Kuala Tungkal, SPK Jambi, dan Akper Palembang. Tidak hanya sebatas itu saja, setelah menjalani pendidikan dasar hingga menengah, Amin kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan sudah menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Universitas Sumatera Utara, S2 Kesmas di Universitas Indonesia dan S3 MPI yang saat ini

¹⁴ Jambi Prima, *"Ini profil bakal calon bupati Tanjung Jabung Barat, Mulyani Siregar"*. <https://jambiprima.com/read/2020/07/04/10996/ini-profil-bakal-calon-bupati-tanjabbar-mulyani-siregar> diakses pada 14 Januari 2023 pukul. 15. 45 WIB.

¹⁵ Akses Jambi, *"sekilas dan latar belakang profil Amin, wakil Mulyani di Pilkada Tanjabbar"*. <https://aksesjambi.com/akses/08/07/2020/sekilas-latar-belakang-dan-profil-amin-wakil-mulyani-di-tanjab-barat/> diakses pada 14 Januari 2023, pukul 15.23 WIB

sedang berproses di UIN STS Jambi. M. Amin berkarir sebagai ASN di Dinkes Provinsi Jambi dan memilih pulang kampung mendampingi Mulyani dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020.

Pasangan calon nomor urut 2 calon Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag dan calon Wakil Bupati Hairan, SH. keduanya merupakan kader potensial yang dimiliki oleh partai amanat nasional (PAN). Anwar sadat yang dikenal sebagai tokoh masyarakat serta tokoh agama yang lahir dari pemuka agama terkemuka di Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi, yang juga pendiri dan pengasuh pesantren terbesar di Tanjung Jabung Barat¹⁶. Juga bukanlah nama baru yang muncul pasalnya Anwar Sadat pernah mencalonkan diri sebagai bupati pada periode 2015-2020 lalu namun gagal namun kegagalan tersebut terbayarkan ketika beliau berhasil memenangkan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 dan kembali memperoleh kemenangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat periode 2020-2024 di waktu yang bersamaan. Sedangkan wakilnya Hairan merupakan tokoh masyarakat yang dua periode memenangkan pemilihan kepala desa Dusun Mudo dan kepala desa Lubuk Sebontan Kaupaten Tanjung Jabung barat. Hairan juga pernah berkarir sebagai anggota DPRD Tanjung Jabung Barat periode 2019-2020¹⁷.

Pasangan calon nomor urut 3 calon Bupati Drs. H. Muklis, Msi. Dan calon Wakil Bupati Supardi, SH. Pasangan ini yaitu pasangan Muklis dan supardi juga

¹⁶ Profil Baru.com, *"Anwar Sadat (Politikus)"*.

[https://profilbaru.com/Anwar_Sadat_\(politikus\)](https://profilbaru.com/Anwar_Sadat_(politikus)) diakses pada 15 Januari 2023 pukul 09.02 WIB.

¹⁷ Liputan Jambi, *"Menelisik Profil Hairan, Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2020"*. [https://liputanjambi.id/site/index.php/content/daerah/menelisik-profil-hairan-calon-wakil-](https://liputanjambi.id/site/index.php/content/daerah/menelisik-profil-hairan-calon-wakil-bupati-tanjab-barat-2020)

[bupati-tanjab-barat-2020](https://liputanjambi.id/site/index.php/content/daerah/menelisik-profil-hairan-calon-wakil-bupati-tanjab-barat-2020) diakses Pada 15 Januari 2023 pukul 09.23 WIB.

bukanlah tokoh yang asing bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Muklis merupakan pejabat kementerian desa dan daerah tertinggal dengan jabatan Sekretaris Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sesditjen PPMD). Dan Muklis juga merupakan mantan sekretaris daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa kepemimpinan bupati Usman Ermulan. Sedangkan wakilnya Supardi sendiri merupakan tokoh masyarakat wilayah Tungkal Ulu yang berasal dari etnis Jawa yang sangat dikenal masyarakat. Supardi juga merupakan ketua dewan cabang persatuan setia hati terate (PSHT) Tanjab Barat yang memiliki anak cabang diseluruh wilayah Kecamatan¹⁸.

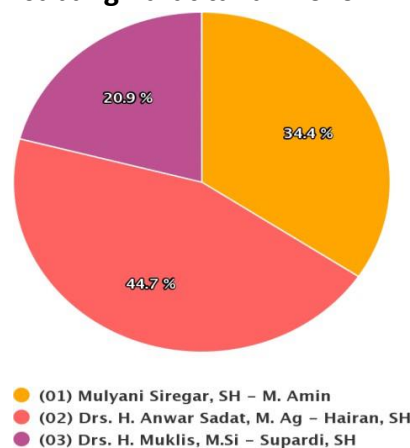
Adanya kekuatan politik pada Mulyani menjadikan Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat itu termasuk pilkada yang kemungkinan besar akan kembali dimenangi oleh partai penguasa kala itu yaitu PDI-P. Selain itu figur mantan bupati Syafrial yang dikenal dan merupakan tokoh dari partai berlambang banteng ini juga tengah memperkuat kekuatan politiknya di Tanjung Jabung Barat dimana istrinya yang bernama Cici Halimah merupakan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat fraksi PDI-P, dan sosok Mulyani Siregar sebagai Ketua DPRD dua periode Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saat ini sedang ia dorong untuk melanjutkan trahnya sebagai pemimpin di Tanjung Jabung Barat melalui partai besutannya bukanlah hal yang sulit. Ditambah lagi PDI-P selalu menjadi basis masa kemenangan di setiap pemilihan.

¹⁸ Jamberita.com, *"Muklis-Supardi Calon Pertama Yang Mendaftar ke KPU Tanjabbar"*. <https://jamberita.com/read/2020/09/04/5961606/muklis--supardi-paslon-pertama-daftar-kpu-tanjabbar> diakses pada 15 Januari 2023 pukul 10.08 WIB.

Namun Pasangan Mulyani Siregar – Amin gagal memperoleh kemenangan hal ini di tunjukan pada data perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bawah ini. Kekalahan pasangan Mulyani Siregar-M.Amin tersebut kemudian membuat peneliti menjadi tertarik untuk mencoba menganalisis kegagalan dari sosok tokoh politik dengan kekuatan politik yang telah terbangun dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Diagram 1.1

Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Serentak di Tanjung Jabung Barat tahun 2020



Sumber : KPU (pilkada2020.kpu.go.id)

Selain itu pada perolehan suara per kecamatan, Mulyani siregar yang merupakan putra asal wilayah Tungkal Ulu yang meliputi kecamatan Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Batang Asam, Pengabuan dan Merlung ini justru menerima kekalahan dari pasangan yang tidak memiliki wilayah basis besarnya, apalagi partai yang di komandoi langsung oleh Mulyani Siregar merupakan partai pemenang dan penguasa di Kabupaten Tanjung jabung Barat di tambah PDI-P juga berkoalisi bersama Golkar dan PPP.

Golkar juga merupakan partai pemenang kedua setelah PDI-P dan PPP juga bukanlah merupakan partai yang kecil di Tanjung Jabung Barat pasalnya Tanjung Jabung Barat merupakan wilayah pesantren dan masyarakat yang berkultur Nahdlatul Ulama (NU) sehingga PPP juga mendapatkan banyak tempat di masyarakat Tanjung Jabung Barat namun faktor tersebut juga tidak mampu mengantarkan sosok Mulyani Siregar meneruskan tahta dari sang kakaknya.

Jika dilihat dari hasil perolehan suara tersebut masyarakat sudah mampu menganalisis bagaimana peran pemimpin yang mampu menjadi tokoh pemimpin mereka sehingga basis kemenangan dari tokoh tak lagi mampu menjadi harapan atau patokan besar untuk berpeluang menang pada kontestasi pemilihan umum, selagi kepemimpinan sebelumnya tidak menunjukkan kelebihan atau kepuasan terhadap masa kepemimpinannya kepada masyarakat. Sehingga kasus kasus kekalahan partai pemenang pemilu pada pilkada di suatu daerah tidak dapat di hindari meskipun parpol telah membrending figur calonnya dengan sedemikian rupa.

Oleh sebab itu peneliti mencoba menganalisis proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 lalu, dan menelaah penyebab kekalahan dari Mulyani Siregar di pilkada serentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahkan pasangan ini yang sudah memiliki trah kekuatan politik yang kuat dan juga telah memiliki *track record* sebagai pemimpin di sana tak menjamin akan mendapatkan perhatian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meneruskan kekuatan politik yang telah dibangun sebelumnya.

Berikut data perbandingan kekalahan Pasangan Mulyani Siregar-M.Amin dengan kemenangan yang di peroleh oleh pasangan Anwar Sadat-Hairan sebagai pasangan calon terpilih, agar tampak jelas perbandingan data anatara pasangan calon Mulyani Siregar-M.Amin sebagai objek penelitian ini dengan pasangan calon terpilih yang telah dianalisis penulis pada penelitian ini.

Tabel.1.1.2

Perbandingan Kekuatan dan kelemahan antara psangan Mulyani-M.Amin dan pasangan Anwar Sadat-Hairan sebagai pasangan terpilih

Mulyani Siregar - M. Amin	Anwar Sadat – Hairan (Calon Terpilih)
1. Jumlah perolehan suara Mulyani Siregar-M.Amin mampu memperoleh suara sebanyak 51.837 suara dengan persentase 34,38%. 2. Pasangan Mulyani Siregar-M.Amin hanya mampu menang di 2 kecamatan dari total 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Secara kekuatan politik Mulyani merupakan Mantan Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, ketua DPC PDI-P Tanjung Jabung Barat dan adik kandung dari Mantan Bupati 2 periode Tanjung Jabung Barat yakni Syafrial.	1. Sedangkan Anwar-Hairan mampu memperoleh suara sebanyak 67.434 suara dengan persentase 44,73%. 2. Sedangkan pasangan Anwar-Hairan berhasil unggul pada 10 kecamatan dari total 13 kecamatan yang ada. 3. Secara jaringan dan modal sosial Pasangan ini mampu menguasai suara para santri dan dimana Tanjung Jabung Barat memiliki 14 Pondok pesantren ditambah unsur organisasi keagamaan yang melekat pada sosok ustad Anwar Sadat.

Sumber : Data Diolah Penulis

Untuk memperkuat penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa sumber penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian dengan pembahasan serupa seperti penelitian dengan judul *“Analisis Kekalahan Petahana (Studi Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Pada Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017)”*, yang ditulis oleh Wandu Jumansyah. Penelitian ini membahas tentang

faktor kekalahan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atau yang sering disapa dengan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017¹⁹. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kekalahan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 seperti; kegagalan Tim Sukses menaikkan citra Ahok-Djarot, gaya komunikasi Ahok dan yang paling dominan adalah Turunnya Citra Ahok-Djarot.

Selain itu faktor tambahan lainnya adalah kegagalan Tim Sukses dibuktikan dengan kurangnya efektifitas kampanye yang dilakukan Tim Sukses ditambah blunder politik dimasa tenang Pilkada mengakibatkan semakin berkurangnya kepercayaan warga terhadap pasangan Ahok-Djarot. Perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada kekalahan penelitian ini adalah gaya komunikasi serta tim sukses yang gagal mempertahankan elektabilitas pasangan calon.

Penelitian kedua peneliti menggunakan jurnal mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Syalfia. Yang berjudul *“Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE)”*. Hasil dari penelitian ini adalah kegagalan pasangan calon perempuan disebabkan factor gender dan strategi politik. Hendaknya setiap kandidat baik laki-laki maupun perempuan baiknya mempersiapkan dan melakukan sosialisasi dari jauh hari dan partisipasi perempuan dalam dunia politik memerlukan dukungan dari semua pihak dan perlunya pendidikan politik perempuan menjadi sangat penting untuk dapat

¹⁹ Wandi Jumansyah, *Analisis Kekalahan Petahana (Studi Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Pada Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017)*. Perpustakaan nasional indonesia, 2019.

bersaing dengan kandidat laki-laki²⁰. Perbedaan pada penelitian ini tentunya jauh berbeda karena pada penelitian terdahulu ini peneliti sengaja mencantumkan dari segi pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif.

Pada penrlitian terdahulu kedua, peneliti mencantumkan pemilihan legislatif guna untuk memperlihatkan bagaimana pola kegagalan yang ditampilkan selain memiliki perbedaan yang jelas dimana peneliti meneliti kegagalan pemilihan eksekutif atau kepala daerah dan penelitian terdahulu yang kedua pada pemilihan legislatif. Jika pada penelitan ini kekalahannya diakibatkan faktor gender dan strategi politik yang kurang optimal, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kurang solidnya para pengurus partai pengusung dan koalisi serta tim sukses dalam memenangkan Mulyani siregar pada pilkada Tanjung Jabung Barat 2020.

Penelitian terdahulu ketiga mengenai kegagalan sebuah partai politik baru yang berada di Provinsi Jambi yang di teliti oleh Dony Anggara, dengan judul *“Analisis Kegagalan Partai Politik Baru pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Jambi Tahun 2019”*²¹. Hasil penelitian memperlihatkan pelembagaan di tubuh PSI dan Garuda Kota Jambi masih jauh dari kata ideal sehingga menjadi faktor penyebab kegagalan partai baru tersebut. Faktorfaktor seperti kesisteman (systemness) partai terkait struktural partai, sumber daya partai (kader) yang kurang mumpuni, pelaksanaan organisasi partai yang tidak sesuai dengan AD- ART partai, sistem rekrutmen anggota maupun caleg yang tidak sistematis,

²⁰Syalfiah, *Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

²¹ Doni Anggara, *“Analisis Kegagalan Partai Politik Baru pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Jambi Tahun 2019*. Skripsi Ilmu Politik Universitas Jambi.

konflik internal, proses sosialisasi yang kurang efektif, beberapa narasi kontradiktif yang diusung partai, sulit bertarung secara ideologi dengan partai besar lama, kegagalan membentuk dan membangun segmentasi atau basis loyal partai (value infusion), tidak adanya hubungan atau jejaring dengan tokoh politik luar, (decisional autonomy), kurangnya figur hingga citra partai yang kurang mendapat tempat di tengah publik Kota Jambi (reification). Pada perbedaannya tentu sangat banyak mulai dari objek penelitian namun memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh pneneliti dimana kurang nya kelembagaan yang baik serta komunuikasi dan tim yang solid dalam pemenangan Mulyani siregar.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti jabarkan, peneliti tidak mampu memperoleh penelitian kegagalan pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi, namun peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas kegagalan baik dari calon legislatif dan partai politik baru di Provinsi Jambi. Untuk itu peneliti menghadirkan sudut pandang baru mengenai kegagalan tokoh politik kharismatik pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi, tepatnya kekalahan Mulyani Siregar pada pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 lalu. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. ***“Analisis Kekalahan Mulyani Siregar-M. Amin Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Di Tinjau Dari Aspek Modal Sosial”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyusun rumusan masalah yakni Apa yang menjadi faktor penyebab kekalahan Mulyani Siregar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekalahan Mulyani Siregar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik, misalnya dalam menganalisis mengenai faktor penyebab kekalahan calon kepala daerah dalam Pilkada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dapat memperkaya informasi mengenai dinamika calon kepala daerah

dalam pemilihan kepala daerah serta bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi calon kepala daerah.

1.5 Landasan Teori

Teori menjadi payung penulis dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut sejumlah teori yang penulis gunakan :

1.5.1 Modal Sosial (Pemikiran Robert Putnam)

“Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku”.²² Kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. “Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta keterampilan dalam menentukan macam kekuasaan untuk merespon tuntutan situasi.”²³ Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) hal ini merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena

²² Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

²³ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik : Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 223

kepercayaan. Secara sederhana modal sosial dapat di maknai sebagai kemampuan masyarakat untuk saling bekerja sama mencapai suatu tujuan bersama.

Kegiatan modal sosial meniscayakan pola hubungan dalam masyarakat yang bersifat kolektif, dengan secara bersama-sama mereka menjaga mutual trust dengan jalannya masing-masing. Mereka menjunjung norma sosial dengan menggunakan jaringan mereka sendiri. Modal sosial ini mendorong ikatan kolektif untuk berlaku sebagaimana yang diharapkan. Mereka menjunjung modal sosial dalam keseharian, dan tidak terkecuali pada tataran pemimpin. Sehingga masing-masing individu tidak saling menyerang dalam rangka memperoleh kekuasaan tetapi justru semangat, modal sosial inilah yang mendorong ikatan kolektif untuk menentukan pemimpin mereka dengan secara lokal.

Menurut Putnam dalam Tiran Rex mendefinisikan “Modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.”²⁴ Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi konteks sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik.

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling

²⁴ Tiran Rex, Teori Modalitas Pierre Bourdieu Dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Jurnal Politicon, Vol X, No. 2, April 2021), diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.²⁵ Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan.

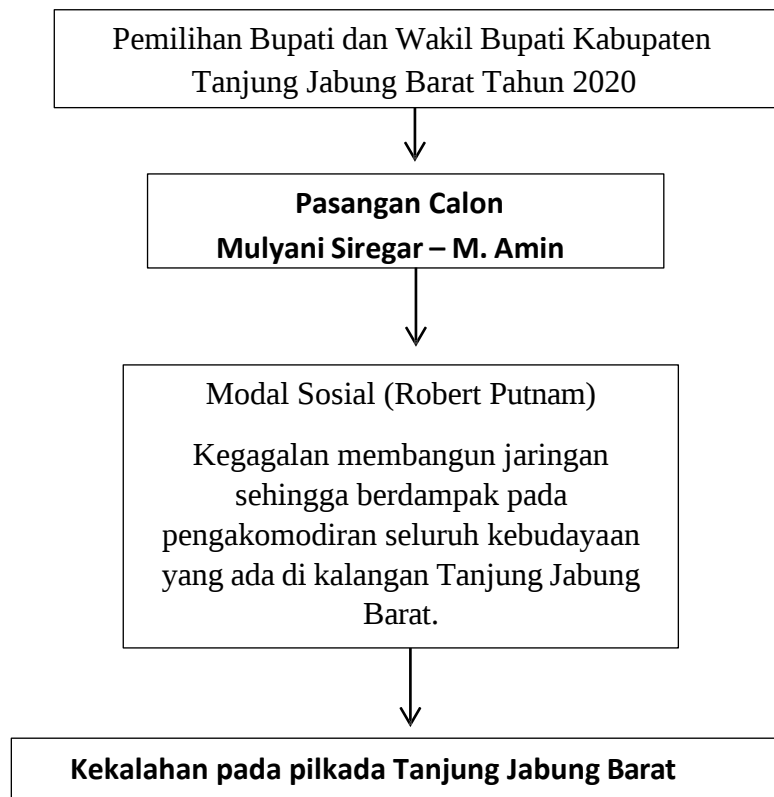
Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilu, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. Menurut Putnam di dalam Putri Indah Adi mengemukakan perlunya pendefinisian jaringan yang dimaksud dalam modal sosial secara empiris, agar dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana modal sosial dapat memengaruhi kebijakan atau masyarakat secara luas.

Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai fitur kehidupan sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan, yang memungkinkan para pesertanya bertindak secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial menjembatani masyarakat dalam kerjasama dan mengurangi perpecahan sosial. Keanggotaan jaringan dan seperangkat nilai bersama menjadi inti dari konsep modal sosial. Modal sosial mengacu pada hubungan sosial dengan kehadiran norma dan kepercayaan. Siapa yang diuntungkan dari hubungan ini harus ditentukan secara empiris, tidak definisional. Modal sosial dalam pengertian ini berkaitan erat dengan partisipasi politik dalam arti konvensional, namun hal ini tidak identik. Partisipasi politik mengacu pada hubungan kita dengan lembaga-

²⁵ Nurhasmi, Moch, dkk, Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta : Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2003), hlm. 8.

lembaga politik. Modal sosial mengacu pada hubungan kita dengan satu sama lain. Putnam menyebutnya sebagai *civic engagement*. Teori modal sosial mengandaikan bahwa secara umum semakin kita berhubungan dengan orang lain, semakin kita mempercayai mereka dan sebaliknya. Kepercayaan sosial dan keterlibatan masyarakat berkorelasi kuat.

1.6 Kerangka Pikir



Kekalahan pasangan Mulyani Siregar-Amin didasari oleh buruknya modal sosial dalam membangun jaringan keseluruhan kebudayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga jaringan yang terbangun tidak mampu mengakomodir perbedaan yang ada sehingga mengakibatkan gagalnya terbangunnya jaringan sosial yang ada. Selain itu juga pola komunikasi yang buruk antara partai koalisi dan tim pemenangan yang tidak all out dalam melakukan proses kampanye politik terhadap kedua tokoh ini. Sehingga trah keluarga dan kekuatan politik partai pendukung tidak dapat mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap pasangan ini. Oleh karena itu peneliti menganalisis adanya kecenderungan pola komunikasi yang buruk di dalam internal tim dan koalisis sehingga kegagalan pada marketing politik terindikasi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dengan tujuan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis.²⁶

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan bersifat penemuan. Penelitian ini mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel dan untuk memahami gejala-gejala sosial dari sudut pandang partisipan. “Metode deskriptif bertujuan untuk mencari teori. Ciri utama metode penelitian ini adalah peneliti langsung terlibat kelapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatat dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitik beratkan pada observasi alamiah”²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 2.

²⁷ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 35.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ada hal menarik yang terjadi ketika seorang Mulyani Siregar yang berpasangan dengan M. Amin menerima kekalahan, membuat penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga pasangan ini tidak terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian pendekatan kualitatif tidak hanya dilakukan berdasarkan variabel penelitian, sebab fenomena yang diteliti bersifat holistik dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menetapkan fokus sebagai pengganti batasan masalah dalam penelitian kuantitatif. Menurut Spradley dalam Ismail Suardi Wekke (2019), Fokus adalah domain yang terkait dengan situasi sosial²⁸. Fokus penelitian ditetapkan setelah peneliti melakukan sekut pra riset mengenai judul penelitian ini kepada orang-orang yang peneliti anggap mampu menjawab permasalahan yang peneliti duga sementara”.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekalahan pasangan Mulyani Siregar – M. Amin padahal pasangan ini jika dilihat dari *track record* dan kekuatan politik lebih unggul, penulis mengasumsikan kekuatan politik yang lebih unggul itu adalah pada

²⁸ *Ibid*, hlm.43

pasangan Mulyani Siregar- Amin, pasangan ini diuntungkan pada sosok Mulyani yang secara kekuatan politik lebih kuat, dimana telah terbangunya basis-basis masa melalui beberapa kali memenangkan pemilihan anggota DPRD Tanjung Jabung Barat bahkan menduduki posisi ketua DPRD yang artinya Mulyani memperoleh suara terbanyak baik sebagai calon dan partai yang ia pimpin, di sisi yang lain Mulyani juga sebagai ketua DPC PDI-P Tanjung Jabung Barat.

Partai yang dikenal sukses di Kabupaten ini ditambah Mulyani merupakan adik kandung dari Syafrial mantan Bupati Tanjung Jabung Barat 2 periode sehingga kekuatan politik mengenai pemahaman akan medan kendali atas masyarakat lebih diungguli dari pada dua pasangan lain yang notabene hanya dikenal sebagai tokoh masyarakat saja.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah “data yang diperoleh penulis dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.²⁹ Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

²⁹ Sugiyono, *Op.Cit.* hlm 225

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.³⁰

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang dipakai oleh penulis kualitatif untuk menentukan siapa saja yang menjadi informan. “Peneliti kualitatif tidak menggunakan sampel, oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan objek terhadap penelitian yang akan diteliti”.³¹ Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan³².

Adapun kriteria informan peneliti adalah orang yang tahu, terlibat dan memiliki pemahaman dan tentunya penulis anggap representatif terhadap penelitian ini diantaranya:

³⁰ Ismail Suardi Wekke, *Op.Cit*, hlm.70.

³¹ Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), Cetakan ke 6. hlm.40.

³² Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 300.

Tabel. 1.7.5
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Latar Belakang	Alasan
1	Mulyani Siregar	Calon Buapti, Ketua DPD PDI-P Tanjung Jabung Barat	Merupakan informan utama, kunci dan memiliki kapasitas untuk menjawab sebagai calon.
2	Kemas Bujang Azhari	Tokoh Masyarakat adat Tanjung Jabung Barat	Memiliki kapasitas untuk menjawab bagaimana sosok Mulyani dari prespektif adat dan budaya bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.
3	Ahmad Harun Yahya	Pengamat Politik Lokal Tanjung Jabung Barat	Memahami peta politik dan keadaan politik di Tanjung Jabung Barat
4	KH. Machfudz	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tanjung Jabung Barat	Selaku tokoh agama, masyarakat yang berada di posisi netral sehingga menjadi sumber data penulis menegnai kekalahan Mulyani Siregar dalam memanfaatkan Modal sosial.
5	Drh. R Budiono Riyadi	Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Tanjung Jabung Barat	Selaku tokoh agama, masyarakat yang berada di posisi netral menegnai kekalahan Mulyani Siregar dalam memanfaatkan Modal sosial
4	Ketua Tim pemenang/ketua Koalisi Mulyani-amin	Memahami kondisi internal pemenangan	Data lebih dalam mengani kondisi internal pemenangan
5	Ketua Tim pemenang calon bupati terpilih	Sebagai informan bandingan kenapa pasangan tersebut bisa menang	Ingin megetahui bagaimana pendapat dari pihak yang memperoleh kemenangan terhadap kekalahan mulyani.

Sumber : Diolah Oleh Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Observasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan.³³ Peninjauan, dan penyelidikan riset. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan dalam Penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama³⁴. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci.

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Edisi Kedua) (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm. 86

³⁴ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Edisi Kedua. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 70

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya³⁵. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. “Dalam penelitian kualitatif

³⁵ Sugiyono, *Op.C it*, hlm. 247.

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori.³⁶ Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun lapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara dan akan berubah apabila pada saat turun lapangan tidak mendapatkan bukti-bukti yang mendukung data sebelumnya. Di sinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat data sebelumnya dan dapat membuktikan kebenaran dari penarikan kesimpulan data sehingga lebih kredibel.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Triangulasi diartikan sebagai teuknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁷ Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang memanfaatkan beberapa sumber informasi berbeda untuk menguji kebenaran mengenai fenomena di lapangan. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe triangulasi yaitu :

³⁶ Sugiyono, *Op.C it*, hlm. 252.

³⁷ Sugiyono, *Op.C it*, hlm. 241.

1. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data (primer dan sekunder) dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda dalam dalam suatu penelitian.

³⁷ Sugiyono, *Op.C it*, hlm. 241.